



BPKHTL VIII
Denpasar



LAPORAN KINERJA (LKJ)

Balai Pemantapan Kawasan Hutan
dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar
Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pada Tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjalankan program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagaimana telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) Revisi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2022-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Revisi Tahun 2023 yang diikat dengan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2023 antara kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam melaksanakan pembangunan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu yang akan datang.



Denpasar, Desember 2023
Kepala Balai

[Handwritten Signature]
Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	5
E. Tindak Lanjut.....	
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2020-2024	8
B. Rencana Kerja Tahun 2023.....	9
C. Rencana Kerja dan Anggaran	10
D. Perjanjian Kinerja	10
E. Reviu Atas Dokumen Perencanaan.....	12
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran.....	41
C. Penghargaan atas prestasi Kerja.....	42
IV. PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	3
2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia.....	4
3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan.....	4
4. Rincian Rencana Kerja Dan Anggaran Pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar	7
5. Rencana kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar.....	8
6. Capaian kinerja sasaran Tahun 2023	13
7. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023	15
8. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023.	16
9. Progres Capaian Kinerja Pada Target RENSTRA 2020 – 2024.....	17
10. Rencana Dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja (PK) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023

Lampiran 2 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar
Tahun 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai institusi pemerintah, selain melaksanakan kegiatan sesuai dokumen perencanaan, BPKHTL wilayah VIII Denpasar juga berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai bahan dari pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang bertujuan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta terwujudnya transparansi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan dan Tata Lingkungan Hutan Wilayah VIII Denpasar tahun 2023. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuannya untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan;
 2. Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
 3. Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
 4. Verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan;
 5. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;
- Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
 - d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
 - e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
 - f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
 - g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
 - h. penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
 - i. pelaksanaan verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. pelaksanaan pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah;
 - l. pelaksanaan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - m. pelaksanaan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah; dan
 - n. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata

persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan;
- c. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing eselon IV dan kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- **Sub Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.
- **Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan kawasan hutan ; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan ; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.
- **Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup ; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah ; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta

tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 sebanyak 57 orang, dengan status PNS/PPPK sebanyak 50 orang dan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap sebanyak 7 orang. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, usia dan golongan terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK Menurut Usia

No.	Usia (Tahun)	S/D 31 Desember 2023		
		L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	25 - 29	2	5	7
2.	30 - 34	4	3	7
3.	35 - 39	7	5	12
4.	40 - 44	6	2	8
5.	45 - 49	8	2	10
6.	50 - 54	5	-	5
7.	55 - 59	1	-	1
8.	> 60	-	-	-
Jumlah		33	17	50



Tabel 3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Tahun 2023						
		A	B	C	D	VII	IX	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-	-			-
2	Golongan II	-	1	6	-	-	-	7
3	Golongan III	13	10	9	3	-	-	35
4	Golongan IV	4	-	-	-	-	-	4
5	Golongan PPPK					1	3	4
Jumlah		17	11	15	3	1	3	50

D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama Tahun 2023, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan : Pada program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, serta Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif baru dilaksanakan pada triwulan ke empat dikarenakan pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan pusat dan adanya perubahan Juknis pelaksanaan.
2. Waktu Pelaksanaan :
 - a. pada kegiatan hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dikarenakan tenggat waktu pembayaran PNPB IPPKH PT. AMNT (wajib bayar) pada bulan Agustus 2023 dan kegiatan verifikasi penggunaan Kawasan hutan pada PT. Sumbawa Juta Raya baru dilaksanakan pada bulan Desember dikarenakan tenggat pembayaran pada bulan Januari 2024.
 - b. Kegiatan Lelang Pembuatan Jalan masuk ke Mess dan Menuju Pasar baru dilaksanakan pada bulan Agustus dan bulan September dikarenakan menunggu keputusan tukar guling, kemudian ada penyesuaian gambar pagar tidak dapat dilaksanakan tukar guling, Rapat dengan BPKAD yang belum bisa memutuskan untuk penyelesaian tukar guling karena memerlukan banyak

proses, akhirnya kebijakan pimpinan tidak jadi tukar guling berdasarkan arahan pimpinan saat peletakan batu pertama.

- c. Kegiatan Lelang Konstruksi Pembuatan Pagar depan, samping, candi bentar dan Dinding Penahan Tanah (DPT) Realisasi Fisik dan Anggaran baru dilaksanakan pada Bulan Agustus dengan jangka waktu 120 hari (4 bulan), sampai dengan tanggal berakhir kontrak belum selesai:

3. Realisasi Fisik dan Anggaran

- a. Kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan yang awalnya luasan peta indikatifnya 7699 Ha (2281 Ha untuk LOTIM dan 5418 Ha untuk Bima) realisasi hanya 3051,48 Ha (1220,89 Ha untuk Kab. Lombok Timur dan 1830,59 Ha untuk Kabupaten Bima, dikarenakan banyak desa yang tidak mengajukan usulan permohonan karena banyak yang sudah diusulkan untuk Perhutanan Sosial. Kemudian untuk Kegiatan Bimtek TORA yang awalnya 3 kegiatan (Bali 1 dan NTB 2) realisasi NTB 2 Kegiatan, Bali tidak dilaksanakan karena Anggota dewan tidak mencalonkan kembali.
- b. Kegiatan Renovasi Mess Kintamani, Lelang Pekerjaan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT, ditawar kurang dari 80% dari nilai Pagu sehingga mengakibatkan potensi sisa dana Rp.862.967.400,-
- c. Terdapat perbedaan realisasi sisa belanja pegawai antara aplikasi SAKTI dan aplikasi OMSPAN sebesar Rp.13.329.612,- dikarenakan kesalahan perhitungan tunjangan kinerja dari bulan Januari – Oktober 2023.

➤ Upaya tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Kajian Tata lingkungan dan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif agar setiap awal kegiatan selalu berkoordinasi dengan Pusat atau direktorat terkait petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
2. Pada kegiatan verifikasi PNBP yang selalu dianggarkan setiap tahun, pengajuan MP PNBP dan Perencanaan di awal agar disesuaikan ke bulan tenggat waktu pembayaran agar kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna;
3. Pada kegiatan Konstruksi Pembuatan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang belum selesai sampai dengan berakhirnya kontrak, maka diberikan pemberian kesempatan sampai dengan tanggal 30 Januari 2024, dan sisa anggaran yang belum direalisasikan sudah di SPMkan dengan menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun);
4. Sisa anggaran kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perkemahan Bakti saka kalpataru

dan saka wanabakti (pertikawan) regional Bali dan Nusa Tenggara yang akan dilaksanakan tanggal 18 – 23 Nop bertempat di Bali Barat Provinsi Bali;

5. Sisa anggaran Kegiatan Renovasi Mess Kintamani, Lelang Pekerjaan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT dipergunakan untuk pemenuhan kegiatan kearsipan dan fasilitas perkantoran;
6. Mengenai perbedaan realisasi tunjangan kinerja antara SAKTI dan OMSPAN, maka mulai bulan Nopember dan Desember 2023 telah diperbaiki tata cara pembayaran tunjangan kinerjanya setelah berkonsultasi dengan bagian keuangan Sekditjen PKTL;



II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu dan berpedoman pada Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis dalam revisi rencana strategis 2020 – 2024 BPKHTL Wilayah VIII adalah kondisi yang ingin dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII pada akhir periode perencanaan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis BPKHTL Wilayah VIII adalah :

- 1) **Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate**, dengan indikator : dilaksanakannya seluruh kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, dokumen pengendalian pemantapan Kawasan hutan dan Panjang batas yang telah diselesaikan hak-hak pihak ketiga;
- 2) **Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan**, dengan indikator : dilaksanakannya seluruh kegiatan pengambilan data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional, Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional yang diantaranya dapat didukung dengan kegiatan Cek Lapangan Resolusi sedang di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 3) **Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA**, dengan indikator : luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 4) **Meningkatnya Upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan**, dengan indikator Layanan kajian tata lingkungan;
- 5) **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima** dengan indikator layanan dukungan manajemen satker BPKHTL, level maturitas SPIP Ditjen PKTL, dan Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Perencanaan program dan kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 pada prinsipnya merupakan bagian dari Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar untuk Tahun Anggaran 2023. Rencana kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2023 secara garis besar terdiri dari :

1. Pencegahan Dampak Lingkungan :

- Fasilitasi Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor;
- Fasilitasi kajian dampak lingkungan bidang Usaha dan Kegiatan;
- Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif.

2. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan :

- Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan hutan;
- Panjang Batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan.

3. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL

- Reenumerasi PSP

4. Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL

- Cek Lapangan hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang

5. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan :

- Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan :

- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Layanan Sarana Internal
- Layanan Prasarana Internal



C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 tercantum pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Uraian	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	1 layanan	50.000.000,-
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	50.000.000,-
3	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif	2 Layanan	640.000.000,-
4	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.218.492.000,-
5	Panjang Batas kawasan yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	819.685.000,-
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	5 layanan	292.661.000,-
5	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	104.873.000,-
6	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah pengelolaan Hutan	2 Badan Usaha	120.000.000,-
7	Layanan Umum	1 Layanan	1.498.900.000,-
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.851.379.000,-
9	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.697.849.000,-
10	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	4.292.993.000,-
	Total		20.636.832.000,-

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan II BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rencana kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Sasaran /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
3	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	5 layanan
7	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
8	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan

10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	185 Unit
12	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit

E. *Reviu atas Dokumen Perencanaan*

Dalam anggaran tahun 2023 jumlah biaya yang mendukung kegiatan program-program tersebut diatas bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan anggaran awal sebesar Rp.8.916.551.000,- (*Delapan milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*). Yang terdiri dari Dana Rupiah Murni (RM) Rp.8.633.890.000,- (*Delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan dana PNBP Rp.282.661.000,- (*Dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu rupiah*) dengan anggaran blokir sejumlah Rp.740.000.000,- (*Tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) untuk kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan. Dari jumlah anggaran tersebut telah terjadi 10 (sepuluh) kali revisi DIPA terkait dengan Blokir *Automatic Adjustment* (AA), perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Refocusing dan penambahan pagu anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Revisi pertama tanggal 23 Desember 2022 DIPA BPKHTL Wilayah VIII dengan anggaran tetap, hanya penambahan angka blokir *Automatic Adjustment* belanja pegawai sebesar Rp.37.374.000,- (*Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 hal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2023;
2. Revisi kedua tanggal 7 Februari 2023 DIPA BPKHTL Wilayah VIII merupakan revisi DJA. Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.42/SET.2/PEHKT/KEU.0/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Usulan RKAKL ABT PNBP-PKH TA. 2023, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat tambahan dana PNBP-PKH sebesar Rp. 11.822.260.000,- penambahan untuk kegiatan Panjang Batas kawasan hutan yang telah diselesaikan (051) Penataan batas kawasan hutan reguler sebesar Rp.

509.260.000,- untuk 17,81 km, kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan (051) Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam kawasan hutan sebesar Rp. 4.393.258.000,- (2 Kabupaten di Lombok Timur dan Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kegiatan Reenumerasi 1 Klaster sebesar Rp.70.000.000,- dan 1 Badan Usaha Kegiatan Verifikasi PNPB PKH sebesar Rp.60.000.000,- kemudian tambahan anggaran belanja modal berupa Layanan Sarana Internal yaitu pengadaan perangkat pengolah data dan Informasi sebanyak 37 unit sebesar Rp.858.602.000,- pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sebanyak 13 unit sebesar Rp.132.240.000,- Layanan Prasarana Internal yaitu pengadaan renovasi gedung 1 unit sebesar Rp.5.000.000.000,- kemudian penambahan anggaran pada Kegiatan Layanan Umum berupa FOLU sebesar Rp.600.000.000,-, survey eksternal dan pelatihan sebesar Rp.100.000.000,- kegiatan pengelolaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM lingkup Ditjen PKTL sebesar Rp.98.900.000,- sehingga Total Anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjadi Rp. 20.738.811.000,- (*Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*) dengan anggaran RM sebesar Rp. 8.633.890.000,- (*delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan anggaran PNPB sebesar Rp.12.104.921.000,- (*Dua belas milyar seratus empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

3. Revisi ketiga tanggal 16 Februari 2023 merupakan revisi Kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detail beberapa kegiatan dan pemuktahiran halaman tiga DIPA tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp. 20.738.811.000,- (*Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*);
4. Revisi keempat tanggal 28 Februari 2023 adalah revisi DJA. Revisi ini merupakan revisi hapus catatan hal IV.a Blokir Program Kualitas Lingkungan Hidup pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar. sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.233/SET.2/PEHKT/KEU.1/2/2023 tanggal 21 Februari 2023 Hal Penghapusan catatan halaman IV. A Blokir DIPA Satker Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran tetap sebesar Rp. 20.738.811.000,- (*Dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah*);
5. Revisi kelima tanggal 17 Juli 2023 adalah revisi Dit DJA merupakan revisi anggaran terkait Relokasi Blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai TA. 2023 Lingkup Ditjen PKTL Kementerian LHK ke BA-BUN sesuai dengan Nomor S-374/AG/AG.3/2023 tanggal 17 Juli 2023 adalah revisi pengurangan belanja

- pegawai *Automatic adjustment* Rp. 37.374.000,- dan Pengurangan di Output Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan hutan sebesar Rp. 175.066.000,- sehingga DIPA BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjadi Rp. 20.526.371.000,- (*Dua puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
6. Revisi keenam tanggal 21 September 2023 merupakan revisi Kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detil pada beberapa kegiatan untuk optimalisasi pelaksanaan anggaran sisa lelang belanja modal disertai dengan Surat Persetujuan dari Eselon I serta menyamakan halaman III DIPA dengan realisasi pada OMSPAN tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp. 20.526.371.000,- (*Dua puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
 7. Revisi ketujuh tanggal 16 November 2023 merupakan revisi Pemuktahiran POK untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detil pada beberapa kegiatan untuk optimalisasi pelaksanaan anggaran sisa anggaran tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp. 20.526.371.000,- (*Dua puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
 8. Revisi kedelapan tanggal 28 Nopember 2023 merupakan revisi DJA yaitu revisi pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja barang operasional sesuai dengan Surat Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal PKTL Nomor:S.1269/SET.2/PEHKT/KEU.1/11/2023 tanggal 20 November 2023, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat tambahan anggaran belanja operasional sebesar Rp. 110.161.000, sehingga anggaran BPKHTL VIII Denpasar bertambah menjadi Rp.20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 9. Revisi kesembilan tanggal 30 November 2023 merupakan revisi Kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan pergeseran anggaran dari belanja (001) ke Belanja pemenuhan belanja operasional (002) tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula Rp.20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
 10. Revisi ke sepuluh tanggal 23 Desember 2023 adalah merupakan revisi pemuktahiran KPA menyamakan halaman III DIPA dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 dengan data OMSPAN tidak merubah anggaran semula menjadi Rp.20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi kinerja.

- Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan

datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

- Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus :

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}} \times 100 \%$$

Penghitungan capaian kinerja menggunakan ketiga rumus di atas dilakukan untuk setiap indikator kinerja sasaran.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Analisis Capaian Kinerja antara target dan Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100

3	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan	2 layanan	100
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
5	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	5 layanan	5 layanan	100
7	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100
8	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	185 Unit	185 Unit	100
12	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100

b. Efektifitas Capaian Kinerja antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Pengukuran efektifitas capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Rincian pengukuran efektifitas capaian kinerja Tahun 2023 tercantum sebagaimana pada Tabel 7

Tabel 7. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022 (%)	2023 (%)	Efektifitas Capaian Kinerja
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	100	100	1,00
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1,00
3	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	-	2 layanan	-
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-
5	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	-	1 Rekomendasi Kebijakan	-
6	Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	Terlaksananya Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	100	-	-
7	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	100	100	1,00
8	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1,00

9	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1,00
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	100	100	1,00
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	100	100	1,00
12	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	100	100	1,00
13	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	100	100	1,00

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggaran. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat pada tabel 8 dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,00.

Tabel 8. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Fisik 2023 (%)	Capaian Keuangan 2023 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	100	99,97	1,00

2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	100	99,94	1,00
3	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	100	99,97	1,00
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	100	99,67	1,00
5	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	98,09	97,70	1,00
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	100	99,49	1,00
7	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	100	100	1,00
8	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	100	98,54	1,00
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	99,93	99,71	0,99
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	100	99,54	1,00
11	Meningkatnya kondisi	Layanan Sarana	100	99,99	1,00

	birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Internal				
12	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	100	80,00	0,80	

c. Analisis Pembahasan Progres capaian kinerja dengan target RENSTRA 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disusun oleh BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024. Tahun 2023 dalam RPJM 2020-2024 merupakan tahun keempat. Progres capaian kinerja terhadap target renstra BPKHTL Wilayah VIII Denpasar sampai dengan tahun 2023 tercantum sebagaimana Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Progres capaian kinerja pada target RENSTRA 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Program Kualitas Lingkungan Hidup										
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	-	2	66,67
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	-	2	66,67

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	2	Layanan	-	-	-	2	-	2	100
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan										
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	3	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	1	1	2	66,67
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	-	1	50,00
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2953	Km	459	701	254	-	-	1414	47,89
Tersedia dan update data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	40	Layanan	10	6	4	5	-	25	62,50
	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	80,00
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di	11	Badan Usaha	2	5	1	2	-	10	90,90

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Wilayah Kerja BPKH									
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	90,90
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	90,90
	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	90,90
	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	1	-	4	90,90

d. Analisis perbandingan Kinerja tahun ini dengan Renja Ditjen PKTL Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Vol)	Realisasi	Target Renja Dit PKTL 2023	Persentase Capaian terhadap Renja PKTL
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
3	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan	2 layanan	20 layanan	10

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Vol)	Realisasi	Target Renja Dit PKTL 2023	Persentase Capaian terhadap Renja PKTL
4	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	24 Rekomendasi Kebijakan	4,16
5	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	29 Rekomendasi Kebijakan	3,44
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	5 layanan	5 layanan	70 layanan	7,14
7	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
8	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	213 Badan Usaha	0,93
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,34
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,34
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	184 Unit	184 Unit	3072 Unit	5,98

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Vol)	Realisasi	Target Renja Dit PKTL 2023	Persentase Capaian terhadap Renja PKTL
12	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	17 unit	5,88

Tabel diatas menunjukkan persentase capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar terhadap Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dari 12 (dua belas) indikator yang menyumbang kinerja sampai dengan 10% adalah kegiatan Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL dengan realisasi 2 (dua) layanan di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum kegiatan yang telah direncanakan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja hampir 100%. Hanya saja pada **kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada 2 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Lombok Timur dan Bima** tidak terealisasi 100% hal ini dikarenakan banyak desa yang tidak mengajukan usulan permohonan karena banyak yang sudah diusulkan untuk Perhutanan Sosial Sehingga sisa anggaran dari kegiatan TORA dialihkan ke kegiatan Pertikawan Saka Wanabakti Saka Kalpataru tahun 2023.

Kabupaten	Luas kriteria indikatif Penataan KH (Ha)			Total target	Realisasi
	Pemukiman, fasum, fasos, transmigrasi yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip	Permukiman, fasum dan fasos	Lahan Garapan		
Bima	1.770	57	5.418	7.245	1.830,59
Lombok Timur		53	2.281	2.334	1.220,89



Kemudian pada kegiatan **Layanan Prasarana Internal**. Pada Tahun 2023 dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan aset tanah dan Bangunan di Jl. Raya Kintamani - Bangli serta turut mendukung program pariwisata ekonomi kreatif demi terwujudnya Gedung/Kantor. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar mendapat Tambahan Anggaran tahun 2023 untuk Renovasi Mess Kintamani sebesar Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) dari tambahan anggaran ABT PNBPKH PKTL yang digunakan untuk membiayai Renovasi Mess Kintamani berupa, Pekerjaan Pagar dan DPT, Pekerjaan Renovasi Mess dan Pekerjaan Pembuatan Jalan Masuk ke Mess dan menuju Pasar yang beralamat di Jl. Raya Kintamani, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, pada progres pelaksanaannya hanya dilaksanakan 2 kegiatan saja yakni Pekerjaan Pembuatan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT serta Pembuatan Jalan Masuk dan Jalan menuju Pasar. Sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 13 Desember 2023, pekerjaan pembuatan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT baru mencapai fisik 80%, sehingga atas arahan Ditjen PKTL dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan pemberian kesempatan sampai dengan tanggal 30 Januari 2024, dan sisa anggaran yang belum direalisasikan sudah di SPMkan dengan menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun). Hal ini akan menjadi perbaikan kedepannya untuk lebih selektif lagi dalam pemilihan penyedia.



f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau sasaran instansi, menyajikan perbaikan ke depan.

➤ **Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL**

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor bertujuan memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait pendayagunaan instrumen tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di daerah. Pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat target 1 (satu) layanan telah dengan

realisasi fisik 100% berupa kegiatan perjalanan dinas antara lain ke daerah dalam rangka :

- a) Konsultasi Publik I KLHS RDTR Perkotaan Celukan Bawang di Kab. Singaraja,
- b) Konsultasi Publik Tahap I dalam rangka penyusunan KLHS RDRT di Kec. Tampaksiring dan Blahbatuh di Gianyar,
- c) Konsultasi Publik tahap II KLHS RDTR di Kec. Tampak Siring dan Kec. Blahbatuh di Gianyar,
- d) Konsultasi Publik Tahap II Penyusunan Dokumen KLHS RPJPD Kab. Gianyar,
- e) Konsultasi Publik Tahap II alternatif dan Rekomendasi RDTR Kawasan Efektif Tanah Lot di Kab. Tabanan,
- f) Konsultasi Publik Tahap I Penyusunan Dokumen Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana detail tata ruang (RDTR) di Kec. Tegallang Tahun 2023 di Gianyar,
- g) Koordinasi pelaksanaan kegiatan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di Kab. Karangasem,
- h) Koordinasi tata lingkungan BPKHTL sebagai lokomotif penerapan instrumen tata lingkungan untuk mewujudkan keberlanjutan di tingkat daerah dan tapak di Jakarta,
- i) Koordinasi pelaksanaan kegiatan tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor diprovinsi Bali pada Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Tabanan,
- j) Perjalanan dinas penguatan kompetensi BPKHTL dalam penyusunan kajian lingkungan hidup dengan mendayagunakan instrument tata lingkungan di Makasar.

Pada kegiatan ini dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya telah dilakukan dengan optimal, dimana Seksi SDHTL semua pegawainya mengikuti Diklat dan terjun langsung dalam mendukung kebijakan lingkungan didaerah serta terintegrasi dengan program prioritas nasional.



➤ **Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL**

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL bertujuan memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait pendayagunaan instrumen tata lingkungan usaha dan kegiatan di daerah. Pada tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat target 1 (satu) layanan telah dengan realisasi fisik 100% berupa Diklat Amdal dasar secara online yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanudin Makasar sebanyak 4 (empat) orang pegawai yang bertujuan mendukung tugas dan fungsi balai dalam hal verifikasi data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan, sistem kajian dampak lingkungan, pelaksanaan forum bimbingan atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup di daerah.



➤ **Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL** merupakan

kegiatan pengumpulan data dan informasi jasa lingkungan hidup terkait dengan air yang dilakukan berdasarkan hasil dari wawancara serta pengamatan kondisi eksisting lapangan berupa bentang alam, vegetasi alami dan tutupan lahan.

Kegiatan ini ditargetkan sebanyak 2 layanan pada tahun 2023 meliputi kegiatan di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Provinsi Bali
Sumber: BPS, 2023

Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air di Provinsi Bali dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten pada Kabupaten Karangasem 4 (empat) Desa, Kabupaten Buleleng 4 (empat) Desa, Kabupaten Tabanan 6 (enam) Desa, dan Kabupaten Jembrana 2 (dua) Desa. Metode pengambilan data dan informasi pada kegiatan verifikasi dilakukan dengan cara interview (wawancara) dengan informan dan responden serta pengamatan dan pendokumentasian kondisi eksisting dilapangan. Pengolahan data lapangan meliputi kegiatan pengelolaan data hasil wawancara informan, pendokumentasian data hasil pengisian kuesioner responden, pengolahan data hasil pengisian kuisioner responden ditiap desa/kelurahan, dan pengolahan data hasil pengisian kuisioner responden di Provinsi Bali.

Verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan pada wilayah desa di Provinsi Bali dengan karakteristik bentang alam (genes) berupa vulkanik, denudasional, marin, fluviovulkanik, struktural lipatan dan vulkanik/marin; serta memiliki indeks jasa lingkungan hidup terkait dengan air kategori rendah sampai dengan sangat tinggi. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada sebagian besar desa memiliki infiltrasi sedang (10 desa kategori sedang, 2 kategori rendah, 1 kategori sangat rendah, 1 kategori sangat tinggi, dan 2 desa kategori tinggi), retensi didominasi kategori tinggi (11 desa kategori tinggi, serta 3 desa kategori sedang dan 2 desa kategori rendah) dan evapotranspirasi yang sebagian besar sedang (10 desa kategori sedang, 2 desa kategori rendah dan 4 desa kategori sangat rendah).



Gambar 7. Kondisi Penutupan Lahan Desa Beraban Kabupaten Tabanan

Hasil kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: BPS, 2023

Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa. Di Kota Bima dilaksanakan pada 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Dara; sedangkan di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan pada 8 (delapan) Desa yaitu Desa Dalam, Desa Luar, Desa Usar Mapin, Desa Buin Baru, Desa Motong, Desa Jorok, Desa Labuhan Sumbawa, dan Desa Labuhan Bontong.

2. Metode pengambilan data dan informasi pada kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan dengan cara interview (wawancara) dengan informan dan responden serta pengamatan dan pendokumentasian kondisi eksisting di lapangan. Pengolahan data lapangan meliputi kegiatan pengolahan data hasil wawancara informan, pendokumentasian data hasil pengisian kuesioner responden, pengolahan data hasil pengisian kuesioner responden di tiap desa/kelurahan, dan pengolahan data hasil pengisian kuesioner responden di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan pada wilayah desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan karakteristik bentang alam (geneses) berupa Fluvial, Denudasional/Fluvial, Fluviiovulkanik, Fluviiovulkanik/Vulkanik, dan Fluvial/Fluviomarin; serta memiliki indeks jasa lingkungan hidup terkait dengan air kategori sedang. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan

bahwa pada sebagian besar desa memiliki infiltrasi sedang (11 desa kategori sedang dan 1 desa kategori tinggi), retensi pada 12 desa semuanya masuk kategori tinggi, serta evapotranspirasi yang sebagian besar rendah (5 desa kategori sedang dan 7 desa kategori rendah).

Secara garis besar kegiatan berjalan dengan baik pada Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya saja saran karena banyaknya Masyarakat yang kesulitan dalam memahami butir – butir pertanyaan dari lembar kuisisioner maka untuk kegiatan berikutnya perlu diperjelas lagi lembar kuisisioner dengan pertanyaan yang lebih sederhana dan spesifik namun tetap mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan

➤ **Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga**

Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Target pada tahun 2023 adalah untuk 2 Rekomendasi Kebijakan antara lain :

Realisasi Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam pada Kelompok Hutan Danuera (RTK.84) adalah sebagai berikut :

- ✓ Panjang batas Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam pada Kelompok Hutan Danuera (RTK.84) adalah 21.499,87 meter.
- ✓ Rintis Batas dibuat sepanjang trayek batas dengan lebar ± 2 meter. Jumlah tanda batas yang terpasang sebanyak 238 buah pal batas dan 23 papan pengumuman.
- ✓ Areal seluas 39,07 Hektar di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah dikeluarkan dari kawasan hutan.
- ✓ Hasil kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Definitif yang dilampiri Peta Hasil Tata Batas Definitif skala 1 : 25.000.



Hasil Penataan Batas Definitif Kawasan Hutan Produksi Terbatas Pulau Matagateh/Nisa Mbe'e Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 7,433,18 meter dengan luas total kawasan hutan adalah 150,13 Hektar. Jumlah pal batas yang terpasang sebanyak 8 buah, dan jumlah papan pengumumannya adalah 8 buah.



➤ **Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL**

Tahun Anggaran 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar awalnya mendapat 3 Klaster yang telah direalisasi di Kabupaten Dompu 2 Klaster enumerasi dan Kabupaten Sumbawa 1 Klaster enumerasi, mendapat tambahan 2 Klaster reenumerasi di Provinsi Bali yaitu di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karang asem.

Re-enumerasi PSP dimaksudkan untuk melakukan pengukuran secara berulang pada plot permanen hasil kegiatan Enumerasi TSP/PSP atau Re-enumerasi PSP sebelumnya, sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data terbaru dari plot permanen yang pernah dilakukan pengukuran sebelumnya sehingga bisa dilihat perubahan atau perkembangan kondisi vegetasi plot tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas data yang sudah ada. Kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan.



➤ **Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL target 1 layanan, realisasi 2 kegiatan pada Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.** Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui kondisi penutupan lahan sebenarnya di lapangan, memperbaiki data penutupan lahan dan mengukur akurasi data penutupan lahan yang sudah dibuat. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mengetahui kebenaran dari hasil penafsiran citra resolusi sedang.
- b. Mengumpulkan data dan informasi tambahan dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra penginderaan jauh, termasuk perubahan penutupan lahan terkini yang belum terdeteksi oleh citra penginderaan jauh yang digunakan.



➤ **Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**

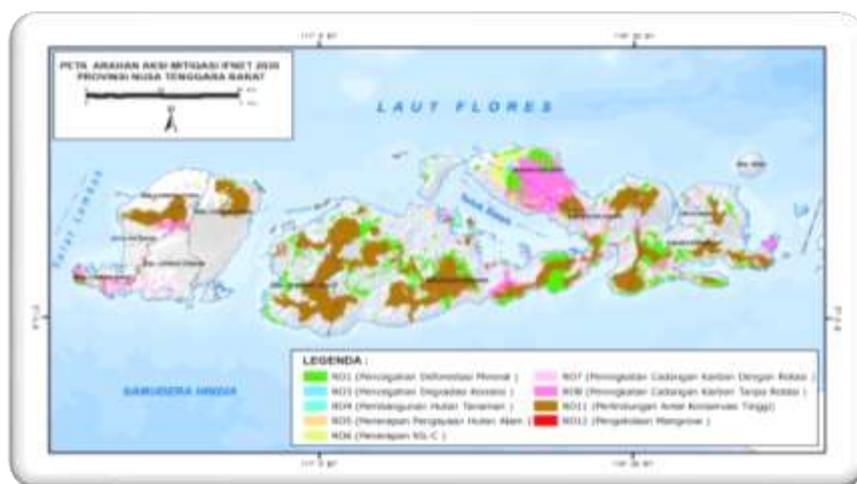
Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mengecek ke lapangan untuk kebenaran atas jumlah pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan desk analysis dan/atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia. Tahun 2023 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat 2 target Badan Usaha yakni PT. AMMAN Mineral Nusa Tenggara dengan Nomor SK IPPKH Nomor 6/1/IPPKH-PB/BKPM/2018 tanggal 23 Mei 2018 di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. Sumbawa Juta Raya dengan Nomor SK. IPPKH Nomor : 82/1/PMDN/2016 tanggal 28 Oktober 2016 di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk 2 (dua) kegiatan ini telah terealisasi 2 Badan Usaha dan kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

➤ **Layanan Umum**

Tahun Anggaran 2023 kegiatan layanan umum dengan target 1 layanan dengan total anggaran Rp. 1.498.900.000,- (*Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari anggaran RM dan anggaran PNPB, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	
A.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	247.734.000,-	246.903.262,-	
B.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	10.080.000,-	10.078.800,-	
C.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	35.237.000,-	35.233.118,-	
D.	Pengelolaan Kepegawaian	164.998.000,-	165.329.285,-	
E.	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	86.646.000,-	85.528.151,-	
F.	Rekonstruksi Arsip	49.939.000,-	49.937.750,-	
G.	Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 9001 – 2015	93.434.000,-	93.434.000,-	
H.	Penyusunan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Bali dan NTB	583.271.000,-	585.336.066,-	
I.	Pelaksanaan Uji Pemetaan/Kompetensi dari BKN Pusat	50.560.000,-	50.553.122,-	
J.	Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	51.302.000,-	51.298.920,-	
K.	Koordinasi/Konsultasi	113.767.000,-	108.986.343,-	
L.	Kegiatan Peletakan Batu Pertama Renovasi Mess Kintamani	11.932.000,-	11.910.700,-	
		1.498.900.000,-	1.494.529.517	99,71

Secara umum semua kegiatan dalam output layanan umum telah terealisasi, Fokus disini adalah pada kegiatan penyusunan Rencana Kerja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Bali dan NTB karena anggarannya yang paling besar dan baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 s/d bulan Nopember 2023 dikarenakan adanya penyusunan ulang *Renop FOLU* di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara ringkas hasil dari Penyusunan Rencana Kerja FOLU *Net Sink* 2023 Sub Nasional Di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :



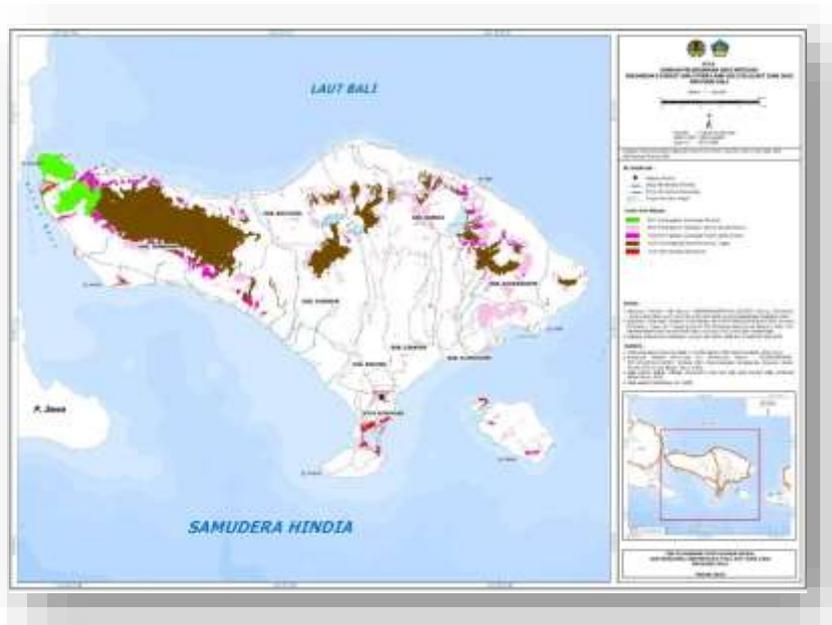
Data Lokasi dan Sebaran FOLU Provinsi NTB

Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Renja yang mendukung tercapainya target penurunan emisi GRK *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030, sehingga penyusunan Renja aksi mitigasi emisi GRK disesuaikan dengan Renja *Indonesia's FOLU Net Sink* 2023-2030 pada tingkat nasional dan disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penyusunan Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 1) Menetapkan peta spasial untuk implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Sub-nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2) Menetapkan Renja program penurunan emisi karbon untuk mempercepat ketercapaian *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Sub-nasional Nusa Tenggara Barat, 3) Penguatan kebijakan untuk pengendalian emisi untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Sub-nasional Nusa Tenggara Barat, dan 4) Identifikasi peran para pihak, mitra-mitra dan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengendalian emisi dalam mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Sub-nasional Nusa Tenggara Barat.

Renja Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi 9 (sembilan) Rencana Operasional (RO) dengan total luasan sementara ± 770.040,66 Ha yang meliputi:

- a. RO 1: Pencegahan deforestasi mineral seluas 165.144,20 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali cagar alam).
- b. RO 3: Pencegahan degradasi konsesi seluas 2.396,50 Ha, yang terdistribusi pada Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Tetap (HPT).
- c. RO 4: Pembangunan hutan tanaman seluas 1.606,14 Ha, yang keseluruhannya berada pada HP.
- d. RO 5: Penerapan pengayaan hutan alam seluas 6.550,01 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali cagar alam dan tahura) dan Areal Penggunaan Lainnya (APL).
- e. RO 6: Penerapan *Reduced Impact Logging-Carbon* (RIL-C) seluas 17.422,62 Ha, yang terdistribusi pada HP dan HPT.
- f. RO 7: Peningkatan cadangan karbon dengan rotasi seluas 80.344,17 Ha, yang terdistribusi pada HP, HPT dan APL.
- g. RO 8: Peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi seluas 111.740,69 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan dan APL.
- h. RO 11: Perlindungan areal konservasi tinggi seluas 381.748,21, yang terdistribusi pada Hutan Lindung (HL), HP, HPT dan APL .
- a. RO 12: Pengelolaan mangrove seluas 3.088,12 Ha, yang terdistribusi pada semua fungsi kawasan hutan (kecuali taman nasional (TN) dan taman hutan raya (Tahura)) dan APL.





Peta Sebaran Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Provinsi Bali

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*) untuk pencapaian ENDC .

Sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Bali telah merumuskan kebijakan daerah, strategi dan rencana aksi, serta melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk penurunan emisi GRK, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, serta pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja FOLU *Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Bali yang berkontribusi terhadap target nasional dalam program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

Dalam rangka pencapaian target FOLU *Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan luasan sebesar 114.529,35 ha yang didistribusikan dalam Rencana Operasional (RO) 1, 7, 8, 11 dan 12. Untuk melaksanakan RO 1, 7, 8, 11, dan 12 guna mencapai target Rencana Kerja FOLU *Net Sink 2030* Sub Nasional Provinsi Bali sesuai arahan nasional sebesar 114.529,35 ha, maka diperlukan pendanaan sebesar Rp 2,128 triliun. Berdasarkan acuan pada identifikasi pembiayaan yang dilakukan di SKPD/KL di Provinsi Bali sampai 2030, maka pembiayaan yang tersedia akan diperoleh dari berbagai sumber dana APBN, APBD, BPD LH dan Lembaga Donor.

Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bali melalui Kelompok Kerja REDD+ yang sudah terbentuk untuk memastikan implementasi berjalan dan terdaftar dalam sistem registasi nasional.

Disamping itu, untuk pelaksanaan RO 1-12 harus disusun *Social and Environmental Safeguard* (SES) yang terintegrasi dengan *Safeguard Information System REDD+* (SIS REDD+) yang telah dirancang nasional, serta memastikan setiap program dan kegiatan yang dirancang teregistrasi dalam *National Registry System* (NRS).

Setiap komponen RO perlu terus dibangun, dikembangkan, diselaraskan, serta konsisten untuk memastikan pencapaian target Rencana Kerja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Bali. Agar pelaksanaan RO 1, 7, 8, 11, dan 12 dapat mencapai target Rencana Kerja FOLU *Net Sink* 2030 Sub Nasional Provinsi Bali diimplementasikan oleh para pihak dengan berbagi tanggungjawab berdasarkan wilayah kelola dan otoritas pengelolaan wilayah. Sebagai upaya untuk memastikan sinergitas para pihak pelaksanaan RO 1-12 dari level provinsi, kabupaten, desa, serta proyek di tingkat tapak, maka *Benefit Sharing Mechanism* (BSM) harus dirancang secara sistematis dan komprehensif.

➤ Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran terdiri gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran Rp. 6.851.379.000,- (*enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) Kegiatan ini telah terealisasi secara rutin setiap bulan.

➤ Layanan Sarana Internal

Kode Kegiatan	Urain Kegiatan	Volume	Target	Realisasi	
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	184,00	Unit	Rp. 1.697.849.000,00	Rp. 1.697.731.900,00
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi			Rp. 837.760.000,00	Rp. 837.760.000,00
A	Pengadaan Alat Survey (ABT PNPB PKH PKTL 2023)			Rp. 402.300.000,00	Rp. 402.300.000,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp. 320.100.000,00	Rp. 320.100.000,00
	- GPS Navigasi dan Kelengkapannya	7,00	Unit	Rp. 51.800.000,00	Rp. 51.800.000,00
	- GPS RTK dan kelengkapannya	1,00	SET	Rp. 169.000.000,00	Rp. 169.000.000,00
	- Drone dan Kelengkapannya	1,00	Unit	Rp. 51.800.000,00	Rp. 51.800.000,00
	- Kompas Tandem	3,00	Unit	Rp. 10.500.000,00	Rp. 10.500.000,00
	- GPS Navigasi Kegiatan SDHTL	5,00	Unit	Rp. 37.000.000,00	Rp. 37.000.000,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin			Rp. 82.200.000,00	Rp. 82.200.000,00
	- Baterai Drone	3,00	Unit	Rp. 8.700.000,00	Rp. 8.700.000,00
	- Harddisk external	3,00	Unit	Rp. 4.500.000,00	Rp. 4.500.000,00
	- Antena drone DJI D-RTK2 base station	1,00	Unit	Rp. 69.000.000,00	Rp. 69.000.000,00
B	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (ABT PNPB PKH PKTL 2023)			Rp. 435.460.000,00	Rp. 435.460.000,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp. 435.460.000,00	Rp. 435.460.000,00
	- Laptop (a.l. untuk mengolah dan analisis data2 GIS)	6,00	Unit	Rp. 129.600.000,00	Rp. 129.600.000,00
	- Laptop Spesifikasi Tinggi	2,00	Unit	Rp. 67.000.000,00	Rp. 67.000.000,00
	- Laptop (a.l. untuk mengolah dan analisis data2 GIS)	2,00	Unit	Rp. 46.200.000,00	Rp. 46.200.000,00
	- Plotter (termasuk scanner)	1,00	Unit	Rp. 62.800.000,00	Rp. 62.800.000,00
	- Scanner A4/Folio (scanner dokumen BATB)	2,00	Unit	Rp. 10.600.000,00	Rp. 10.600.000,00
	- Printer A4/Folio	4,00	Unit	Rp. 13.360.000,00	Rp. 13.360.000,00
	- Printer A3	3,00	Unit	Rp. 36.000.000,00	Rp. 36.000.000,00
	- Smart TV/Monitor dan kelengkapannya untuk Pembahasan Tata Batas dan TORA	1,00	Unit	Rp. 62.400.000,00	Rp. 62.400.000,00
	- Walkie Talkie/Handy Talkie	3,00	Unit	Rp. 7.500.000,00	Rp. 7.500.000,00
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran			Rp. 860.089.000,00	Rp. 859.971.900,00
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (ABT PNPB PKH PKTL 2023)			Rp. 553.439.000,00	Rp. 553.321.900,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp. 553.439.000,00	Rp. 553.321.900,00
	- Laptop untuk kegiatan Tata Usaha	2,00	Unit	Rp. 25.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
	- Laptop	5,00	Unit	Rp. 59.995.000,00	Rp. 59.995.000,00
	- Printer A4/Polio	4,00	Unit	Rp. 21.992.000,00	Rp. 21.992.000,00
	- Printer A4/Folio untuk Kegiatan Tata Usaha	5,00	Unit	Rp. 27.490.000,00	Rp. 27.490.000,00
	- Laptop Kepala Balai	1,00	Unit	Rp. 29.700.000,00	Rp. 29.700.000,00
	- Scanner untuk Keuangan	1,00	Unit	Rp. 5.300.000,00	Rp. 5.300.000,00
	- AC 1,5 PK	7,00	Unit	Rp. 44.800.000,00	Rp. 44.800.000,00
	- AC 2 PK	8,00	Unit	Rp. 64.800.000,00	Rp. 64.800.000,00

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Volume	Target	Realisasi
	- Laptop untuk PPBJ, Anggaran, Verifikator Keuangan	4,00	Unit Rp. 64.000.000,00	Rp. 64.000.000,00
	- Laptop Pejabat Eselon IV	1,00	Unit Rp. 32.000.000,00	Rp. 32.000.000,00
	- Laptop Pengolahan Peta	1,00	Unit Rp. 21.500.000,00	Rp. 21.500.000,00
	- TV untuk Ruang Rapat	1,00	Unit Rp. 99.600.000,00	Rp. 99.600.000,00
	- Tablet untuk Digitalisasi Perkantoran	2,00	Unit Rp. 45.500.000,00	Rp. 45.500.000,00
	- TV untuk Ruang Tamu	1,00	Unit Rp. 9.062.000,00	Rp. 9.400.000,00
	- Dispenser	1,00	Unit Rp. 2.700.000,00	Rp. 2.244.900,00
B	Pengadaan Kegiatan Kearsipan		Rp. 306.650.000,00	Rp. 306.650.000,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp. 306.650.000,00	Rp. 306.650.000,00
	- Lemari Roll O Pack	1,00	Unit Rp. 85.000.000,00	Rp. 85.000.000,00
	- Lemari Arsip Sliding	4,00	Unit Rp. 17.200.000,00	Rp. 17.200.000,00
	- Mesin Penghancur Kertas (Shredder)	1,00	Unit Rp. 39.800.000,00	Rp. 39.800.000,00
	- Filing Cabinet (4 Laci)	4,00	Unit Rp. 12.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
	- Lemari Peta/Gambar	1,00	Unit Rp. 11.600.000,00	Rp. 11.600.000,00
	- Dehumidifier	1,00	Unit Rp. 17.000.000,00	Rp. 17.000.000,00
	- Smart Book Scanner	1,00	Unit Rp. 16.600.000,00	Rp. 16.600.000,00
	- Troli Buku	1,00	Unit Rp. 1.100.000,00	Rp. 1.100.000,00
	- Kursi Rapat	80,00	Unit Rp. 82.400.000,00	Rp. 82.400.000,00
	- Meja Kepala Balai	1,00	Unit Rp. 18.000.000,00	Rp. 18.000.000,00
	- Kursi Kepala Balai	1,00	Unit Rp. 5.950.000,00	Rp. 5.950.000,00



B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan Anggaran Keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan roda kegiatan di lingkup BPKHTL Wilayah VIII Denpasar. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-029.06.2.238670/2023 Tanggal 30 Nopember 2022, secara keseluruhan anggaran yang diterima BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2023 ini sebesar Rp. 20.636.532.000,- (*Dua puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 8.706.677.000,- (*Delapan milyar tujuh ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) dan yang bersumber dari dana PNBPNP sebesar Rp. 11.929.855.000,- (*Sebelas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) Rincian mengenai rencana dan realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 tercantum pada tabel 10 berikut :

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran

No	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentasi Realisasi (%)
1	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	50.000.000	49.985.972	99,97
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	50.000.000	49.968.708	99,94
3	Dokumen Hasil Verifikasi lapangan kawasan dengan Indeks Jasa lingkungan tinggi secara partisipatif di Wilayah kerja BPKHTL	640.000.000	639.823.996	99,97
4	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	4.218.192.000	4.211.712.630	99,85
5	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	819.685.000	816.341.717	99,59
6	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	292.661.000	292.496.860	99,94
7	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	104.873.000	104.263.000	99,42
8	Hasil Verifikasi PNBPNP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	120.000.000	118.245.600	98,54
9	Layanan Umum	1.498.900.000	1.494.529.517	99,71
10	Layanan Perkantoran	6.851.379.000	6.820.063.001	99,54
11	Layanan Sarana Internal	1.697.849.000	1.697.731.900	99,99
12	Layanan Prasarana Internal	4.292.993.000	4.292.990.040	100,00
Total		20.636.532.000	20.588.152.941	99,77

Meskipun pagu anggaran tidak dapat terealisasi 100%, namun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat cukup memuaskan yaitu 99,77 %. Seluruh output yang direncanakan juga dapat dicapai dengan baik, efisiensi kerja maupaun efektifitas kerja rata-rata mendapatkan nilai 1,00 .

C. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA

Tahun Anggaran 2023, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh penghargaan :

1. Piagam Penghargaan terbaik I Kategori Kepatuhan Pelaksana Verifikasi PNPB-PKH Tahun 2022 (Pelaksanaan < 20 Wajib Bayar)
2. SIGAP Award Salaka / Perak terbaik 2 Pelayanan Informasi Geospasial Tematik Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2023
3. SERTIFIKAT ISO 9001 : 2015 PROVISION SERVICES OF ESTABLISHMENT AND PLANNING OF FOREST AREA, FOREST RESOURCES AND ENVIRONMENT.



IV. PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Kepada Direktur Jenderal Planologi Dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2023. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja yang akan datang.

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 menyajikan berbagai capaian kinerja kegiatan pada tahun 2023. Pelaksanaan sasaran kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Revisi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2020-2024.

Capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2023 adalah sebesar 100% sedangkan Realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 mencapai 99,77% dan realisasi fisik mencapai 99,85%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mana realisasi anggarannya sebesar 98,94% dan realisasi fisik 99,52%,.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar akan terus berusaha dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang ada.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2023

Pihak Kedua,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Pihak Pertama,

Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PERUBAHAN I)

SATUAN KERJA : 238670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Meningkatnya upaya Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan				
1.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
2.	Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Dokumen
3.	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	1	Layanan
II.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan				
1.	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	3	4	Klaster
		Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	1	Layanan
III.	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan				
1.	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	2	Badan Usaha
IV.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga	8	25,72	Km
V.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA				

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	1	Provinsi
VI.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK				
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82	82	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH	Pelayanan publik lainnya	-	2	layanan
5436.QAH.002	Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	-	1	Layanan
5436.QAH.003	Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	-	1	Layanan
5436.QMA	Data dan Informasi Publik			
5436.QMA.002	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	-	2	Dokumen
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1	2	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	-	1	Rekomendasi Kebijakan
5433.PBV.002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1	1	Rekomendasi Kebijakan
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA	Data dan Informasi Publik	4	5	Layanan
5434.BMA.002	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	3	4	Layanan
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1	1	Layanan
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	2	Badan usaha
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1	2	Badan usaha
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	3	Layanan
5432.EBA.962	Layanan Umum	1	1	Layanan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	51	Unit

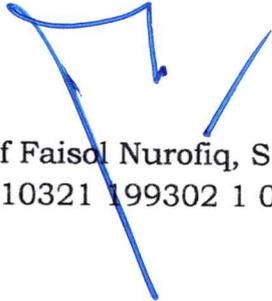
Kode	Kegiatan/ KRO/ RO	Volume		
		Semula	Menjadi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-	50	Unit
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	-	1	Unit

Program/Kegiatan	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		
1. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 310.425.000,-	Rp. 5.037.877.000,-
2. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp. 327.534.000,-	Rp. 397.534.000,-
3. Rencana dan Pengawasan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Pencegahan Dampak Lingkungan	Rp. 740.000.000,-	Rp. 740.000.000,-
Program Dukungan Manajemen		
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 7.478.592.000,-	Rp. 14.230.960.000,-
TOTAL ANGGARAN	Rp. 8.916.551.000,-	Rp. 20.526.371.000,-

Jakarta, September 2023

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar



Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001



Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003

RENCANA AKSI REVISI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

No	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan			
				B 03	B 06	B 09	B 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5436.QAH.002	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	-	-	-	Layanan Kajian Tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL
5436.QAH.003		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	1 Layanan	-	-	-	Layanan Kajian Tata Lingkungan Tata Lingkungan usaha dan kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL
5436.QMA.002		Tersedianya data dan informasi inventarisasi jasa lingkungan tinggi	2 Dokumen	-	-	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	-
5433.PBV.001	Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam Kawasan hutan	Terselesaikannya pelepasan Kawasan hutan untuk TORA	1 Rekomendasi Kebijakan	-	- - Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inver Kab. Lombok Timur - Sosialisasi dan Pendataan Awal Lombok Timur	- Pelaksanaan Kegiatan INVER Lapangan Kab. Lombok Timur - Pelaksanaan Kegiatan Inver Lapangan Kab. Bima	- Pembahasan Kab. Lombok Timur - Penyelesaian Kegiatan Kab. Lombok Timur - Pembahasan Kab. Bima - Penyelesaian Kegiatan Kab. Bima

No	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan			
				B 03	B 06	B 09	B 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Inver Kab. Bima - Sosialisasi dan Pendataan Awal Kab. Bima - Penyerahan SK. TORA Lingkup Provinsi Bali 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Teknis/Sosialisasi Penyelesaian Pelepasan Kawasn Hutan untuk TORA 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/Konsultasi - Sosialisasi/Bimtek Terkait Penyelesaian Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA dalam rangka perkemahan bakti sakawanabakti dan saka kalpataru di Provinsi Bali - Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Hutan
5436.PBV,002	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Trayek Batas sepanjang 8 km di Kabupaten Bima Provinsi NTB - Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Pihak Ketiga Pulau Matagateh sepanjang 8 km 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif Pulau Matagateh sepanjang 8 km Kabupaten Bima Prov. NTB - Pembuatan Trayek Batas sepanjang 17,81 km di Kab. Bima - Pemancangan Batas Sementara KH. Danuera sepanjang 21,26 km 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Definitif KH. Danuera sepanjang 21,26 km di Kab. Bima 	

No	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan			
				B 03	B 06	B 09	B 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5433.BMA.002	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	5 Layanan	- Re-Enumerasi PSP NTB (3 Klaster) - Bimbingan dan Pengawasan Pengukuran Re-Enumerasi PSP NTB (1 Klaster)	Re-Enumerasi Klaster PSP Bali (2 Klaster)		
5434.BMA.003	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya layanan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang di Provinsi NTB (Lombok Timur dan Sumbawa)			
6744.BAC.001	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	Terlaksananya Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Badan Usaha			Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan pada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kabupaten Sumbawa Barat	Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan pada PT. Sumbawa Juta Raya kabupaten Sumbawa
5432.EBA.962	Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum	1 Layanan	- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan - Pengeloaan Kepegawaian	- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan - Pengeloaan Kepegawaian - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan - Pengeloaan Kepegawaian - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran - Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan - Pengeloaan Kepegawaian - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga

No	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan							
				B 03	B 06	B 09	B 12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
				<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Umum dan Rumah Tangga - Rekonstruksi Arsip - Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001-2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001-2015 - Pelaksanaan Uji Pemetaan/Kompetensi dari BKN Pusat - Pengelolaan Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001-2015 - Penyusunan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Prov. Bali dan NTB - Koordinasi/ Konsultasi Kegiatan Peletakan Batu Pertama Renovasi Mess Kintamani 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Prov. Bali dan NTB - Koordinasi/ Konsultasi 	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Perkantoran	1 Layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji dan Tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji dan Tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji dan Tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji dan Tunjangan - Operasional dan pemeliharaan kantor 	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Terlaksananya Kegiatan Layanan Sarana Internal	184 Unit/M2/Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Alat Survey - Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Informasi - Pengadaan Fasilitas Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Fasilitas Perkantoran 		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Fasilitas Perkantoran - Pengadaan Kegiatan Kearsipan 				

No	Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target per Triwulan			
				B 03	B 06	B 09	B 12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Terlaksananya Kegiatan Layanan Prasaran Internal	1 Unit/M2/Paket		- Renovasi Gedung (Biaya Perencanaan 3 Paket Kegiatan)	- Renovasi Gedung (Pelaksanaan Fisik 2 Kegiatan) - Pekerjaan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT - Pembuatan Jalan Masuk Ke Mess dan Pasar	- Renovasi Gedung (Pelaksanaan Fisik 2 Kegiatan) - Pekerjaan Pagar Depan, Samping, Candi Bentar dan DPT - Pembuatan Jalan Masuk Ke Mess dan Pasar

Denpasar, Desember 2023



Kepala Balai Pemantapan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar,

[Signature]
Heru Sri Widodo, S.Si, M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003

Keterangan cara pengisian Rencana Aksi Pelaksanaan Perjanjian Kinerja :

- (1) Diisi dengan nomor urut.
- (2) Diisi dengan Kegiatan/Sasaran sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
- (3) Diisi dengan Indikator Kinerja sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
- (4) Diisi dengan target 1 tahun sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
- (5) Diisi dengan target antara yang akan dicapai pada Triwulan I (dapat berupa volume capaian output atau berupa tahapan proses yang terukur).
- (6) Diisi dengan target antara yang akan dicapai pada Triwulan II (dapat berupa volume capaian output atau berupa tahapan proses yang terukur).
- (7) Diisi dengan target antara yang akan dicapai pada Triwulan III (dapat berupa volume capaian output atau berupa tahapan proses yang terukur).
- (8) Diisi dengan target antara yang akan dicapai pada Triwulan IV (dapat berupa volume capaian output atau berupa tahapan proses yang terukur).



**Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah VIII Denpasar
Tahun 2023**